



IZIN TAMBANG BELAH SUARA ORMAS AGAMA

Tak semua ormas keagamaan menyambut 'karpas merah' untuk mengelola usaha pertambangan. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), wakil resmi agama Katolik di Indonesia, menyatakan penolakan. Sementara, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) yang mewakili agama Kristen di Indonesia, mengaku pengelolaan tambang bukan bidang pelayanan mereka. Terpisah, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk ormas keagamaan melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-undang itu mengatur tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Administrasi Pemerintahan). Baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang setuju dan bakal menerima izin pengelolaan tambang bekas Grup Bakrie yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Baca di hal 11....

HADIAH TAMBANG UNTUK ORMAS AGAMA

LAHAN TAMBANG YANG AKAN DIBERIKAN:

- PT Kaltim Prima Coal (KPC),
- PT Arutmin Indonesia,
- PT Kendilo Coal Indonesia,
- PT Adaro Energy Tbk,
- PT Multi Harapan Utama (MAU),
- PT Kideco Jaya Agung.

LAHAN ITU DIALOKASIKAN KEPADA ENAM ORMAS AGAMA:

- Nahdlatul Ulama (NU),
- Muhammadiyah,
- Kristen (Persatuan Gereja Indonesia),
- Katolik (Kantor Waligereja Indonesia),
- Hindu,
- Buddha.

SEKILAS TENTANG KPC UNTUK PBNU

- Pada Oktober 2003, BUMI mengakuisisi 100% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pada 2023, BUMI memiliki 25% saham langsung dan 25,99% tidak langsung di KPC.
- Sejak 1 Januari 2022, KPC memiliki IUPK untuk 61.543 hektar di Sangatta dan Bengalon, Kalimantan Timur. Tambang Sangatta, yang terbesar di Indonesia, terhubung ke pelabuhan Tanjung Bara dengan overland conveyor sepanjang 13 km.
- Pada 2023, produksi batubara KPC mencapai 53,6 juta ton, naik 9% dari 49,2 juta ton pada 2022, dengan kapasitas fasilitas 60 juta ton. KPC menargetkan produksi 53,5 juta ton per tahun hingga 2026.

Government (Hal.2)
IKN Jelang HUT Ke-79
Kemerdekaan RI :
Baru 4 Rumah Selesai,
Transportasi Umum
Tenaga Listrik Siap
Agustus

ORMAS

ORN

IKN Jelang HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Baru 4 Rumah Selesai, Transportasi Umum Tenaga Listrik Siap Agustus

JAKARTA-Presiden Jokowi optimistis upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 bisa dilakukan di IKN. Karena itu, pembangunan terus dikebut mulai dari bandara hingga rumah dinas.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tamu yang akan diundang bisa masuk lewat Bandara VVIP dan Bandara Balikpapan. Selain itu, para menteri juga bisa singgah ke rumah dinas. Sayangnya, dari 36 unit yang dibangun, baru 4 rumah yang selesai.

"Kalau enggak salah 36 yang sudah ada. Yang sudah finish ada 4," kata Budi dikutip Minggu (9/6/2024)

Pengerjaan rumah dinas 36 menteri Jokowi di IKN ini ditargetkan rampung secara menyeluruh pada Juli 2024. Jokowi dijadwalkan akan menginap di sana sejak bulan yang sama.

"Pak Presiden itu malah rencananya bulan Juli mau ngingep di sana. (Istana Presiden) beberapa rencana sudah (Jadi). Beberapa hari yang lalu udah ngingep di rumah menteri juga," katanya.

Budi mengatakan, rumah dinas Menteri di IKN nantinya juga dapat dipakai untuk menginap tamu-tamu besar usai upacara 17 Agustus mendatang. Adapun tamu prioritas yang bisa menginap di sana yaitu Duta Besar (Dubes).

"Bisa juga katakanlah kita kan biasanya upacara kan jam 10. Kalau dia terbang dari sini (Jakarta) jam 6, itu bisa langsung ngingep. Khususnya Dubes lah ya. Yang harus kita fasilitasi dengan khusus ya. Para menteri bisa cari jalan sendiri lah ya. Tapi tamu negara ini memang kita perlakukan khusus nanti," katanya.

Jika tamu besar tersebut memilih untuk kembali ke Jakarta setelah upacara 17 Agustus, pemerintah akan menyediakan transportasi khusus untuk mereka.

"Jadi kalo langsung bolak-balik kita bisa carter beberapa pesawat, katakanlah 4 pesawat, bisa bolak-balik sebagian. Karena jam 10 kan, jam 10 sampai jam 12 (selesai acara 17 Agustus)," ujarnya.

Menhub juga mengatakan transportasi massal berbasis listrik (electric vehicle) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mulai beroperasi pada Agustus 2024.

"Kita pikir penerapan electric vehicle di IKN relatif sudah bisa terlaksana dalam bulan Agustus nanti," kata Menhub Budi saat peninjauan transportasi massal Transjakarta di Jakarta, Minggu (9/6/2023).



Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan, mempercepat pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. (Dok. Kementerian PUPR)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadakan bus-bus listrik untuk transportasi massal. Selain kendaraan bus listrik, terdapat juga kereta otonom tanpa rel atau Autonomous-rail Rapid Transit (ART) untuk melayani transportasi massal.

"ART itu semacam trem tapi yang istimewa tanpa rel dan listrik, dia pakai baterai, Agustus mulai berjalan," ujarnya.

Para menteri dan pejabat eselon I diminta untuk menggunakan kendaraan listrik.

"Swasta apakah itu blue bird, gojek, grab sudah mau beroperasi di sana," tuturnya.

Sementara untuk taksi terbang atau drone yang mengangkut penumpang, Menhub Budi menuturkan pihaknya belum bisa menemukan regulasi yang sesuai.

"Regulasi ini kan kita mengacu pada negara-negara maju, Amerika pun belum memberikan suatu izin yang formal," ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum akan memberikan izin untuk taksi terbang sebagai moda transportasi di IKN.

"Kota menggunakan drone, ada risikonya. Oleh karenanya, kita belum memberikan izin untuk taksi terbang, untuk exhibition boleh, untuk angkutan umum belum," tuturnya.

Sebelumnya, terkait layanan bus listrik, Kemenhub telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 dengan mengusulkan 3 rute trayek.

Ketiga trayek tersebut yakni rute Park & Ride sampai Masjid Raya dengan total kebutuhan 13 bus medium; rute Park & ride sampai Botanical Garden total kebutuhan armada 7 bus medium; dan rute Park & ride 1 sampai Park & ride 2 dengan total kebutuhan 21 armada.

Curiga Temuan BPK

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak matang dalam perencanaannya, sebagaimana yang diungkap oleh hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau bahasa kerennya itu terlalu terburu-buru dan dipaksakan. Jadi temuan BPK itu tidak sinkron dengan blueprint IKN," ujar Trubus, Minggu (9/6/2024).

Trubus juga curiga proyek yang memakan anggaran triliun itu dan dalam rencananya akan dianggarkan ratusan triliun rupiah tersebut, bakal dikorupsi dalam pengerjaannya.

"Termasuk roadmap-nya dengan realitas di lapangan dengan anggaran yang sudah di anggarkan. Jadi ini sebenarnya ada indikasi korupsi juga di pembangunan IKN itu," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

"Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana," tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun

DERETAN MASALAH IKN

1. MASALAH TEKNIS

Masalah teknis seperti terganggunya proyek dengan proyek pemerintah yang juga cukup masif di IKN dan harga material meroket karena kebutuhan yang cukup tinggi.

2. KEPEMILIKAN LAHAN

Presiden Jokowi memberi mandat untuk selesaikan status lahan di IKN seluas 256.000 hektare. Namun, hingga saat ini belum semua tanah di IKN statusnya jelas.

3. GAJI TERTUNDA 11 BULAN

Mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sempat mengeluhkan terkait gaji yang telat dibayarkan selama 11 bulan. Saat itu, Perpres Hak Keuangan belum rampung.

4. SUPLAI MATERIAL MELAMBAT

Suplai material konstruksi melambat, untuk memenuhi kebutuhan yang besar tersebut masih harus didatangkan dari luar wilayah pembangunan IKN.

2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

"2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkan hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (tri,ist,ina,rls/dya)

DPR RI Kritik Bahan Makanan Impor untuk Katering Jamaah Haji

JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroiti pemakaian bahan makanan impor untuk katering jamaah haji Indonesia tahun ini. Menurut anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, produk yang diambil dari Thailand dan Vietnam itu menandakan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.

Apalagi, kata Luluk, jumlah jamaah haji Indonesia sangat banyak dan membutuhkan pasokan yang besar selama musim haji berlangsung. "Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?" kata anggota Fraksi PKB itu melalui keterangan tertulis Minggu (9/6/2024).

Diketahui, Timwas Haji DPR baru saja melakukan pengecekan perjalanan haji di Madinah, Arab Saudi pada Sabtu (8/6/2024). Salah satunya dengan menggelar inspeksi terhadap makanan yang disediakan Nooha for Catering Services Company Al Hijrah.

Luluk menyayangkan penggunaan bahan impor dari Thailand dan Vietnam untuk jamaah haji Indonesia. Dia berharap pemerintah bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan mengambil bahan pangan dari tanah air.

Luluk mengatakan pemerintah harus mampu melakukan perluasan impor dan memperbesar jejaring agar dapat mengirimkan bahan makanan dari Indonesia ke Arab Saudi. "Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka (ke jumlah jemaah haji) relatif kecil," ucap Luluk.

Kemudian, Luluk mempertanyakan kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam mengirimkan bahan pangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Pemerintah, kata dia, terlihat menghadapi kendala dalam mengeksport bahan baku ke Arab Saudi untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia.

"Jika kendalanya adalah harga



Petugas Tim Pengawasan Sanitasi dan Makanan Kementerian Kesehatan memeriksa kualitas makanan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. (Kemenkes)

ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand," ujar Luluk. Dia pun mengatakan Timwas Haji DPR berencana mengecek ke Kementerian Perdagangan untuk memastikan ada tidaknya kendala dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Arab Saudi.

Selain itu, Luluk juga meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melihat mengkaji kemungkinan mereka bisa memenuhi kebutuhan makanan jamaah haji Indonesia. "Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang," ujar dia.

Total 73 Jamaah Indonesia Meninggal

Jumlah calon jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia terus bertambah. Hari ini dilaporkan tiga orang lagi jamaah haji yang meninggal dunia.

Hingga Minggu (9/6/2024) petang ini tercatat jumlah calon jamaah haji yang meninggal dunia sebanyak 73 orang.

Data tersebut dikutip dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) hingga pukul 19.00 WIB.

Angka kematian tersebut lebih rendah bila dibandingkan data tahun lalu. Hingga hari ke-28 pemberangkatan calon haji tahun lalu terdapat 105 orang yang meninggal dunia.

Secara keseluruhan sepanjang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 lalu sebanyak 773 jamaah haji asal Indonesia meninggal dunia baik sebelum maupun sesudah menjalankan ibadah.

Sementara itu dari Arab Saudi dikabarkan beberapa calon jamaah haji meninggal dunia pada hari ini. Mereka berasal dari beberapa daerah.

Seorang calon haji asal Kimak Merawang Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama Abdul Hamid Usman (80) meninggal dunia di Rumah Sakit Saudi Jerman Makkah.

"Abdul Hamid Usman yang tergabung dalam kelompok terbang 04 PLM, meninggal dunia Sabtu, 8 Juni 2024/2 Zulhijjah 1445 H pukul 23.00 WAS di RS Saudi Jerman Makkah," kata

panitia pemberangkatan jamaah Kantor Kementerian Kabupaten Bangka Gazali di Sungailiat.

Di rumah sakit itu kata dia, sebelumnya yang bersangkutan sempat menjalani operasi jantung dan dinyatakan berhasil bahkan sudah dapat kembali ke hotel.

Kabar lainnya, seorang calon haji Embarkasi Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci, Arab Saudi.

"Iya satu calon haji asal NTB meninggal dunia di Arab Saudi," ujar Plt Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag NTB Azharuddin di Mataram, Minggu.

Ia menyebutkan calon haji yang meninggal ini atas nama Rumini Muhammad berusia 87 tahun yang tergabung dalam kloter 11 asal Praimeke Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

"Meninggal pada hari Sabtu (8/6/2024) pukul 09:00 Waktu Arab Saudi (WAS) di RS An-Nur dan di makamkan di Pemakaman Syuhada Harom Sareah, Makkah," terangnya.

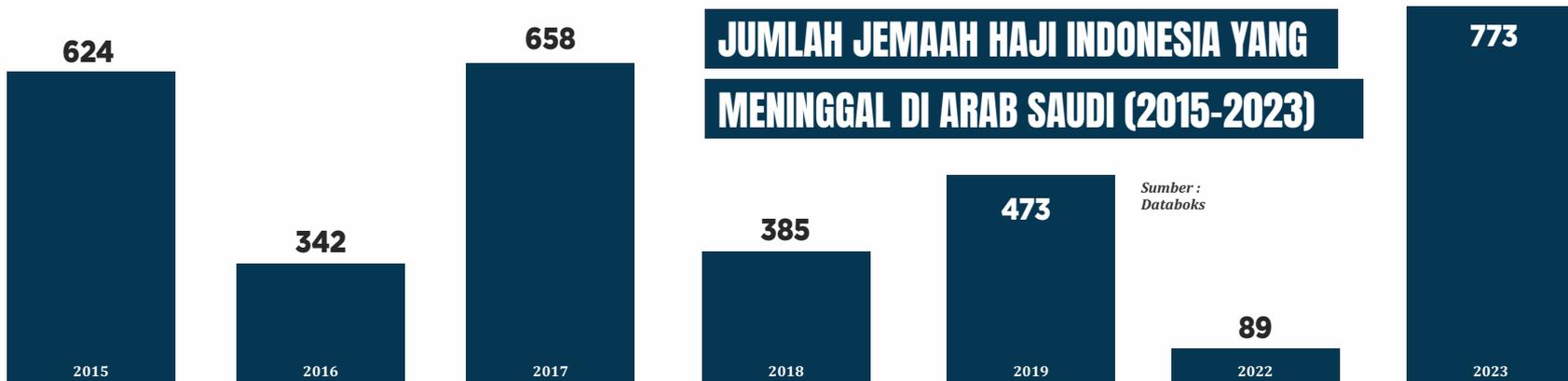
Selain kedua jamaah tersebut, dikabarkan pula seorang jamaah asal Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat meninggal dunia.

"Iya satu calon haji asal NTB meninggal dunia di Arab Saudi," ujar Plt Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag NTB Azharuddin di Mataram, Minggu.

Calon haji yang meninggal ini atas nama Rumini Muhammad berusia 87 tahun yang tergabung dalam kloter 11 asal Praimeke Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

"Meninggal pada hari Sabtu (8/6/2024) pukul 09:00 Waktu Arab Saudi (WAS) di RS An-Nur dan di makamkan di Pemakaman Syuhada Harom Sareah, Makkah," terangnya.

Dengan meninggalnya Rumini Muhammad, maka total calon haji NTB yang meninggal di Arab Saudi kini menjadi dua orang. (wid,rls,ist/dya)



Wali Kota Surabaya: 1 Persil Tanah Maksimal 3 KK

SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Salah satu fokus utama adalah menindaklanjuti temuan banyaknya rumah yang dihuni puluhan Kartu Keluarga (KK).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Karenanya pemkot mengambil kebijakan satu persil tanah maksimal 3 diisi Kartu Keluarga (KK).

"Pemkot mengambil kebijakan 1 persil itu adalah 3 KK, sambil kita lihat jumlah jiwanya berapa. Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan. Kami bisa membantu sekolahnya sampai kuliah," kata Wali Kota Eri, Minggu (9/6/2024).

Wali Kota Eri pun mempertanyakan kelayakan rumah berukuran 3x4 meter yang menampung 3 KK berisi 12 jiwa. Dimana rumah tersebut seharusnya memiliki ruang tamu, ruang makan, dan ruang tidur.

"Tipe 45, itu paling kecil. Kalau sekarang 3x4 meter itu rumah atau bukan, itu pertanyaannya. Berarti kan kos-kosan. Nah dalam kos-kosan itu ada yang sampai 50 KK, kemudian mau tidur di mana dia," ujarnya.

Untuk itu, pemkot membatasi satu

persil rumah maksimal diisi 3 KK. Hal ini dilakukan untuk memastikan intervensi yang diberikan pemkot tepat sasaran dan merata kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. "Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan," jelasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa pemkot memprioritaskan bantuan sosial untuk warga asli Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan. "Kalau sekarang 1 rumah 50 KK, terus semua nunut (menumpang), sekolahnya pemkot yang bayar. Nah orang asli Surabaya yang tinggal di Surabaya nasibnya gimana?" tanya dia.

Karena itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa pemkot mengambil langkah tegas dengan mendobrak sistem yang memungkinkan satu rumah dihuni puluhan KK. "Ini yang saya lakukan untuk orang Surabaya. Kalau ternyata dia mau masuk KK (Surabaya), dia harus bikin surat pernyataan tidak menerima bantuan," tegasnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga melarang warga memecah KK dalam satu rumah hanya karena bertujuan ingin mendapatkan bantuan sosial. "Misalkan aku yang nikah, aku ikut rumah orang tua. Setelah itu aku pecah KK. Lho kalau pecah KK dari orang tua di dalam rumah itu, pemkot mengontrol untuk pemberian bantuan itu gimana," ujarnya.



Walikota Surabaya, Eri Cahyadi

Menurut dia, pecah KK hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan, akan membuat pendataan menjadi tidak akurat. Di samping itu juga hal ini akan menyulitkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

"Pendekatan-pendekatan akan saya lakukan dengan cara berbeda. Dia pecah KK, dalam satu rumah dua sampai tiga KK tapi minta bantuan semua, ini kan jadi berat," jelasnya.

Oleh sebabnya, ia menegaskan bahwa warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dalam satu KK yang benar-benar sesuai dengan jumlah penghuni rumah.

"Saya bilang kalau minta bantuan semuanya ya masukan di sini (1 KK). Jadi saya bisa tahu dalam satu KK ada berapa jiwa, sentuhannya gimana, sehingga (tahu) dia (pendapatan) dapat berapa juta dalam 1 bulan," katanya.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan memberikan intervensi bantuan kepada warga yang memiliki KK bermasalah. "Tapi kalau pecah KK dalam satu rumah, tak kasih syarat, jangan minta bantuan. Alhamdulillah tidak ada yang mau. Ternyata pecah KK untuk minta bantuan tambah kacau," sebutnya. (ama,rls/dya)

Tahun Depan Pemprov Jatim Terancam Kehilangan PAD Rp 4 T dari Pajak Kendaraan



Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono selepas acara HUT ke-24 Apkasi di Pondok Prigi, Trenggalek, Sabtu (8/6/2024). (RoHumas)

TRENGGALEK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bakal kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor

sebesar Rp 4 triliun. Ini akibat terjadinya perubahan komposisi bagi hasil dengan kabupaten/kota.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono

mengatakan, perubahan komposisi bagi hasil pajak tersebut seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

"Ternyata Jawa Timur itu PAD-nya mayoritas dari pajak kendaraan bermotor, dari Rp 22 triliun (total PAD) kita, hampir Rp 18 triliun dari pajak kendaraan," kata Adhy Karyono selepas acara HUT ke-24 Apkasi di Pondok Prigi, Trenggalek, Sabtu (8/6/2024).

Menurutnya, pada komposisi sebelumnya 70% dana bagi kendaraan hasil pajak kendaraan dimiliki provinsi dan 30% diberikan untuk kabupaten dan kota. Namun, dengan undang-undang baru tersebut komposisi bagi hasil berubah total.

"2025 ini atas usulan Apkasi ya 66 persen itu (untuk) kabupaten kota dan sisanya 34 persen itu adalah provinsi maka provinsi ada kehilangan Potensi Jawa Timur ini Rp 4 triliun," ujarnya.

Secara umum, Pj Gubernur mengaku tidak mempersoalkan perubahan tersebut. Sebab, yang akan menerima manfaat adalah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Namun, jika komposisi bagi hasil untuk masing-masing kabupaten/kota didasarkan pada jumlah kendaraan, pihaknya khawatir justru akan menimbulkan ketimpangan bagi hasil antarwilayah. Kondisi didasarkan pada fakta pertumbuhan kendaraan paling banyak berada di kota besar, seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo dan Gresik.

"Bisa-bisa Rp 4 triliun tuh satu triliun ada di Surabaya, jadi yang kaya makin kaya, yang sedih makin sedih," imbuhnya.

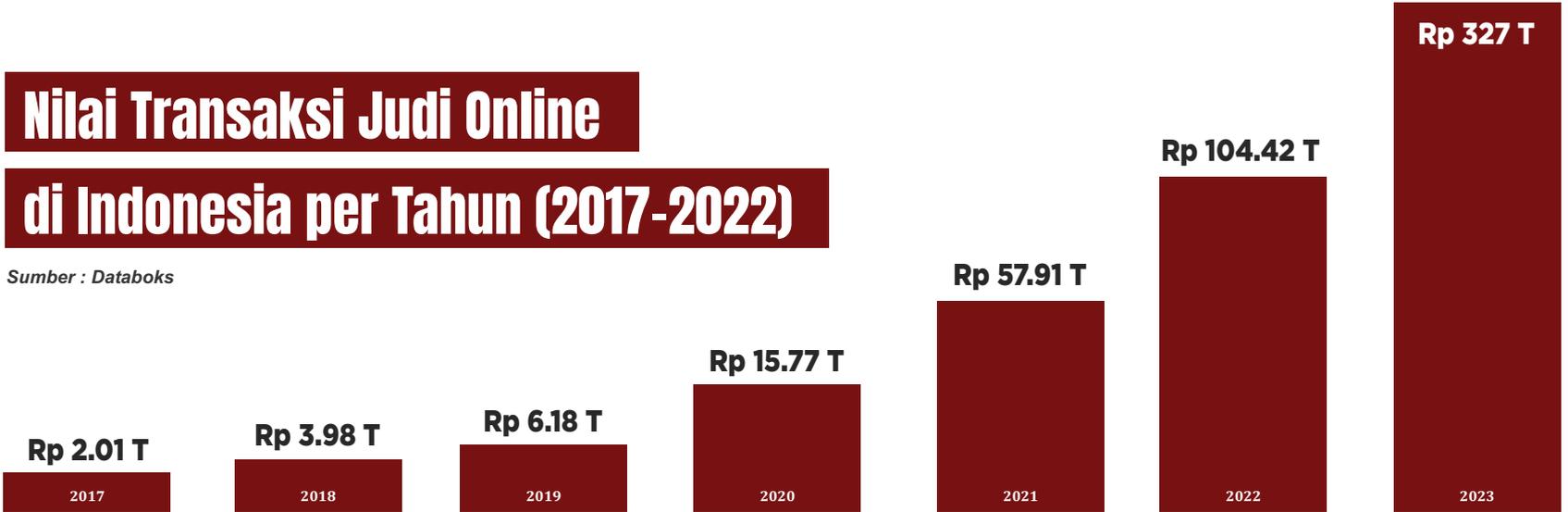
Persoalan tersebut saat ini masih menjadi pembahasan di antara provinsi dan pemerintah pusat. Harapannya bagi hasil pajak kendaraan dilakukan secara proporsional sesuai dengan kapasitas kemampuan dan kebutuhannya. (wid,dtc,rls/dya)

OJK Desak Bank Miliki Sistem Lacak Transaksi Judi Online

Nilai Transaksi Judi Online

di Indonesia per Tahun (2017-2022)

Sumber : Databoks



JAKARTA-Praktik judi online masih marak terjadi di Indonesia. Adapun transaksi judi online mencapai Rp 100 triliun pada kuartal I-2024, berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Bahkan hingga saat ini masih sulit diberantas, bahkan oleh bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun meminta perbankan membangun sistem 'deteksi dini' terkait transaksi judi online yang biasanya dalam jumlah kecil.

"Sistem yang harus bisa memantau pergerakan yang aneh-aneh dari (transaksi) yang kecil-kecil itu. Hal itu harus dibangun (sistem perbankan). Kami upayakan hal tersebut bisa terjadi," ujar Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Mirza Adityaswara, Sabtu (8/6/2024).

Ia menjelaskan, nominal transaksi judi online berkisar Rp 100.000 hingga Rp1 juta. Di sisi lain, perbankan baru bisa melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika terdapat transaksi mencurigakan di atas Rp 500 juta.

Hingga saat ini OJK telah memblokir 5.000 rekening judi online. Namun menurut Mirza, hal tersebut tidak cukup untuk memberantas transaksi judi online.

Mirza yang juga mantan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) itu pun meminta agar perbankan bisa melacak pergerakan rekening judi online.

"Upaya itu tentu tidak berhenti di situ. Harus bisa kita tracing (lacak) rekening ini, sebenarnya ke mana larinya," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menegaskan akan mempersulit gerak pemilik rekening judi online. Nantinya, pemilik rekening judi online itu akan diblokir di seluruh bank.

"Dan kami akan lihat yang dari [rekening] yang sudah diblokir ini

untuk kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut ya, untuk melihat kemungkinan bagaimana nama-nama pemiliknya, juga untuk menjadi orang-orang yang kemudian harus diperhatikan di seluruh bank, bukan hanya di bank-bank tempat rekening mereka diblokir," kata Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda

menyebut praktik tersebut juga ada kaitannya dengan fintech peer to peer (P2P) lending secara tidak langsung.

Hal itu bisa dilihat dari adanya kesamaan pencarian kata kunci fintech lending atau pinjaman online dengan zeus slot (proxy judi online). Selain itu, dia bilang fintech lending juga bisa menjadi sarana yang bisa digunakan pemain judi online dalam mendapatkan pinjaman dengan cepat.

"Proses fintech lending sangat gampang, cukup punya KTP, akun

digital platform, dan sebagainya, bisa langsung dapat pinjaman di sejumlah platform. Hal itu makin berpeluang, khususnya jika fintech lending tak menerapkan pengecekan kemampuan bayar calon peminjam yang lebih valid," tuturnya.

Faktor lainnya, yakni sifat konsumtif anak muda. Nailul menerangkan hal itu ditunjukkan oleh data OJK, yang mana untuk saat ini pinjaman konsumtif memakan porsi sekitar 65% dari total pinjaman. (ist,wid,kum/dya)

Motif Polwan Bakar Suami yang Juga Polisi di Mojokerto: Uang Belanja Dipakai Judi Online

MOJOKERTO-Motif Briptu Fadhilatun Nikmah (28) membakar suaminya yang juga polisi yaitu Briptu Rian Dwi Wicaksono (29) dilatarbelakangi judi online. Briptu RDW (29) diketahui sering menggunakan uang belanja untuk bermain judi online.

"Almarhum ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan ke media semua," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, Minggu (9/6/2024).

"Ya kejengkelan istri itu tadi. Karena memang perilaku almarhum ini menghabiskan uang yang harusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dipakai untuk main judi online," jelasnya.

"Sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT kekerasan dalam rumah tangga," kata Dirmanto.

Dirmanto melanjutkan, "Pelaku masih trauma yang mendalam.

Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing Polda Jawa Timur."

Dirmanto mengatakan korban meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. "Korban pada pukul 12.54 WIB tadi dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Peristiwa itu terjadi di Asrama Polres Mojokerto, Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Sabtu (8/6/2024), pukul 10.30 WIB.

Briptu Rian Dwi Wicaksono, merupakan Anggota Polres Jombang; sementara Briptu Fadhilatun Nikmah, adalah polisi yang bertugas di Polresta Mojokerto.

"Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit IV Ditreskrim Renakta. Ini masih trauma yang mendalam," kata Dirmanto.

"Sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT," imbuhnya.

Kata dia, fasilitas trauma healing



pun diberikan. Sang suami kini juga sudah tewas akibat luka bakar 90 persen. "Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing Polda Jawa Timur," katanya.

"Kemudian juga kita melibatkan psikiatri untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini," tutupnya. (wid,rls, ist/dya)

Bila PAK 2024 Disetujui, 10 Pasar Tradisional Kabupaten Malang Bakal Dibenahi



Kondisi salah satu Pasar Tradisional di Kabupaten Malang. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pembenahan 10 pasar tradisional akan menjadi fokus Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang tahun ini. Kepala Disperindag, Nor Fuad Fauzi, mengungkapkan meskipun belum ada alokasi anggaran dalam APBD Murni 2024, pihaknya

bakal mengusulkan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini.

Fuad juga menyebutkan, langkah ini diambil untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di pasar-pasar tersebut, demi meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.

"Kami mencoba berupaya untuk berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, barangkali ke depannya ada perbaikan yang bisa dilakukan," ujar Fuad, saat dikonfirmasi melalui sambungan selular, Minggu (9/6/2024). Untuk diketahui, penunjukan Fuad sebagai Kepala Disperindag dilakukan setelah ditetapkan APBD Murni 2024.

Menurut Fuad, Disperindag Kabupaten Malang telah melakukan pemetaan dan mengidentifikasi sekitar 10 pasar yang memerlukan perbaikan segera. Meskipun tidak dapat menyebutkan secara rinci pasar-pasar mana saja yang bakal dibenahi, Fuad menyatakan Pasar Pakis dan Pasar Sumberpucung akan menjadi fokus dalam pembenahan ke depan.

"Yang segera itu sekitar 10 pasar. Saya lupa keseluruhannya. Tapi Pasar Lawang gak termasuk. Seingat saya ada Pasar Pakis, terus Pasar Sumberpucung juga," tambahnya.

Fuad menjelaskan, kondisi pasar yang sering terdampak banjir saat hujan, sehingga menyebabkan

ketidnyamanan bagi pedagang. Merupakan alasan utama yang mendasari perlunya perbaikan segera.

"Ya, kan kasian. Karena kalau hujan, itu rata-rata banjir, jalannya tergenang. Nah kalau kayak gini kan pembeli menjadi tidak nyaman, pedagang juga terdampak," jelasnya.

Lebih lanjut, disinggung mengenai estimasi anggaran, Fuad menyatakan jika revitalisasi total memerlukan biaya yang besar. Namun, fokus Disperindag saat ini terletak pada pemeliharaan khusus untuk 10 pasar prioritas tersebut. Oleh karena itu, menurutnya pembenahan 10 pasar ini akan diusulkan dalam PAK tahun 2024. Yang saat ini tengah komunikasikan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD).

"Kalau mau revitalisasi total, ya banyak. Tetapi kan ini kita hanya membenahi beberapa yang perlu dilakukan perbaikan. Jadi sifatnya pemeliharaan. (Anggarannya) belum tahu, ya. Ini kan kita juga masih inventarisir di pasar-pasar itu tadi," terangnya. (Santi/Dya)

Penyelenggara Pilkada Kota Malang Digelontor Rp 11 M untuk Honorarium, Terbesar KPPS

MALANG - Anggaran untuk honorarium petugas penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Malang, mencapai angka yang signifikan yaitu sekitar Rp 11 miliar. Dana ini dialokasikan untuk membayar gaji Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan tenaga keamanan linmas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Aminah Asminingtya mengatakan, jumlah anggaran yang besar ini mencerminkan komitmen serius dalam menyukseskan gelaran Pilkada 2024.

"Honorarium terbesar dialokasikan untuk KPPS, dengan total sekitar Rp 7,2 miliar. Rincian anggarannya meliputi Rp 1,08 miliar untuk 1.200 Ketua KPPS dan Rp 6,12 miliar untuk 7.200 Anggota KPPS," ujar Aminah, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (9/6/2024).

Namun, Aminah mengakui, alokasi anggaran tersebut masih bersifat sementara. Karena jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Malang masih dalam tahap penghitungan hingga saat ini. Menurutnya, jumlah TPS akan memengaruhi kebutuhan

tenaga kerja dan anggaran secara keseluruhan.

"Perkiraan jumlah TPSnya kan 1.200, tetapi angka ini masih dapat berubah tergantung pemetaan jumlah pemilih nanti. Jadi harus dipastikan jumlah TPS," tambahnya.

Selain itu, Aminah juga menyebutkan rincian anggaran honorarium lainnya. Di antaranya yakni PPS yang mencapai Rp 1,8 miliar. Mencakup 57 Ketua PPS dan 114 anggota KPPS.

Sementara untuk PPK, sambungnya, anggaran sebesar Rp 436 juta dialokasikan bagi 5 Ketua PPK dan 20 Anggota PPK di Kota Malang. "Masa kerja PPS dan PPK nanti berlangsung selama delapan bulan, mulai dari Mei hingga pasca Pilkada," jelas Aminah.

Tak kalah penting yakni anggaran untuk tenaga pengamanan pilkada. Menurutnya, sama seperti Pemilu Pilpres dan Pileg Februari 2024 lalu, setiap TPS akan diisi oleh dua petugas linmas, sehingga diperlukan sekitar 2.400 tenaga pengamanan dengan anggaran Rp 1,56 miliar.

"Tenaga linmas ini sangat vital untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan

suara. Pengamanan yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya insiden yang dapat mengganggu jalannya pilkada," papar Aminah.

Lebih lanjut, Aminah juga menuturkan, total anggaran pilkada untuk KPU Kota Malang seluruhnya mencapai Rp 55 miliar, dan dana tersebut telah dikirim oleh Pemkot Malang. Menurutnya, dana ini akan digunakan untuk berbagai keperluan logistik dan operasional, memastikan setiap aspek pilkada dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai informasi, adapun besaran honorarium Penyelenggara Pilkada 2024 di Kota Malang, mulai dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2,5 juta, anggota PPK sebesar Rp 2,2 juta. Kemudian Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp 1,5 juta dan anggota PPS sebesar Rp 1,3 juta.



Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas. (Santi/Lenteratoday)

Sedangkan untuk Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebesar Rp 900 ribu dan untuk anggota KPPS sebesar Rp 850 ribu. Sementara untuk petugas satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) digaji sebesar Rp 650 ribu untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara pada Pilkada 2024. (Santi/Dya)

PUTRI ISNARI, PENYANYI DANGDUT ASAL BALIKPAPAN

PUTRI Isnari adalah penyanyi dangdut asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Putri mengawali kariernya di dunia hiburan setelah berhasil menjadi juara kedua dalam ajang pencarian bakat Dangdut Academy (DA) musim ke-4 Indosiar.

Wanita kelahiran 3 Januari 2004 ini sudah menekuni dunia tarik suara khususnya nyanyian dangdut sejak masih duduk di bangku kelas 4 SD.

Kala itu, ia juga banyak memenangkan berbagai lomba menyanyi hingga akhirnya memberanikan diri ikut audisi DA 4 pada tahun 2017.

Putri awalnya ikut audisi tahap awal di Kota Balikpapan karena berhasil lolos. dia pun harus kelakukan audisi lanjutan di Kota Makassar yang memakan waktu 13 jam perjalanan menggunakan kapal laut.

Putri akhirnya sampai ke tahap audisi dengan bertemu dengan para juri penyanyi dangdut kawakan yakni Lis Dahlia, Benigno, dan Nassar.

Pada saat audisi Putri menyanyikan lagu "Jera" yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto dan ia pun berhasil lolos untuk ikut tahap selanjutnya di Jakarta.

Jalan Putri berlangsung panjang di DA 4 Indosiar hingga akhirnya berhasil menjadi juara kedua.

Setelah memenangkan DA 4, Putri merilis lagu pertamanya yang berjudul Doa Ku pada tahun 2017.

Diberi Uang Panai Rp 2 Miliar

Putri Isnari ungkap awal mula keluarga suaminya bisa memberikan uang panai sebesar Rp 2 miliar.

Diungkap Putri, semua berawal dari konten podcast yang dia lakukan jauh sebelum mengenal suaminya saat ini, Abdul Azis.

Dalam podcast tersebut Putri mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan suami pengusaha dan diberi mahar miliaran.

Putri tak menyangka konten itu ternyata ditonton oleh ayah dan ibu mertuanya saat dia akhirnya berniat menikah dengan Abdul Azis.

"Mereka nonton podcast. Serius, mereka nonton podcast," kata Putri.

"Padahal Putri enggak ada pas ditanya 'kamu mau uang panai

berapa?' Enggak ada pertanyaan itu awalnya," ujarnya.

Ayah dan ibu mertuanya yang melihat podcast itu akhirnya menawarkan untuk memberikan uang panai Rp 2 miliar pada Putri.

"Bapak mertua lihat, mama mertua lihat, jadi kayak 'mau uang Rp 2 miliar?' Bercanda-bercanda, 'apa sih Pa, enggak lah,' ucap Putri saat itu.

"Deg-degan (juga saat ditanya)," imbuhnya.

Walaupun mertuanya menawarkan nominal yang pernah Putri ucapkan di podcast, tapi Putri mengatakan itu bukan jadi hal yang harus dipaksakan.

"Aku bilang enggak memaksakan harus, tapi kalau terwujud ya Alhamdulillah. Enggak yang pokoknya harus," jelasnya.

Karena itu, Putri bersyukur mertuanya justru akhirnya mengabdikan keinginan yang hanya diucapkannya dalam konten tersebut.

Namun dari beberapa hal yang dialaminya, Putri yakin bahwa ucapan juga merupakan doa. Oleh sebab itu dia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara.

Untuk diketahui, Abdul Azis yang

kini menjadi suami Putri Isnari merupakan putra pengusaha batu bara di Kalimantan Timur, Haji Alwi.

Pertemuan Putri dengan Abdul Azis pertama kali terjadi saat Putri diundang menyanyi di acara yang digelar keluarga Haji Alwi (Kompas)



BERIKUT DERETAN LAGU PUTRI ISNARI:

Single

- Doa Ku (2017) Bintangku (2019)
- Drama Cinta (2021)
- Berbisik (2022)

Sebagai anggota Byoode

- Cinta Ramadan (bersama JD Eleven) (2021)
- Jangan Coba-Coba (2021)

Kolaborasi

- Ajari Aku (bersama Tasya Rosmala) (2019)
- Ramadan Berkah (bersama Selfi, Lesti, Rara, Aulia, Fildan, Faul, Reza) (2020)
- Sempurnakan Cinta (bersama Hari Putra) (2022)

Instagram/
@da4_putri03





Indikator Orang Gemuk Disebut Obesitas

KELEBIHAN berat badan dan obesitas adalah kondisi yang didefinisikan sebagai peningkatan ukuran dan jumlah sel lemak dalam tubuh.

Kondisi tersebut disebabkan oleh banyak faktor termasuk seperti pola makan, kurang tidur, aktivitas fisik, obat-obatan tertentu, serta genetika dan riwayat keluarga.

Obesitas adalah kondisi kesehatan kronis yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan terkait dengan banyak masalah kesehatan lainnya, termasuk diabetes tipe 2 dan kanker.

Umumnya, indeks massa tubuh digunakan untuk menentukan seseorang memiliki berat badan normal atau mengalami kelebihan berat badan dan obesitas, khususnya pada orang dewasa.

Apa itu indeks massa tubuh?

Indeks massa tubuh adalah ukuran lemak tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan dan didefinisikan sebagai ukuran berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter.

Menurut National Heart, Lung, and Blood Institute NIH, indeks massa tubuh adalah perkiraan lemak tubuh dan dapat digunakan untuk mengukur risiko penyakit yang dapat terjadi karena banyaknya lemak tubuh.

Semakin tinggi indeks massa tubuh, semakin tinggi risiko Anda terkena penyakit tertentu seperti

penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan lain-lain.

Indikator ini juga menjadi metode skrining yang mudah untuk kategori berat badan, baik itu berat badan kurang, berat badan sehat, kelebihan berat badan, dan obesitas.

Meski menjadi indikator berat badan, namun ia bukan alat untuk mendiagnosis kegemukan tubuh atau kesehatan seseorang.

Sebab indeks massa tubuh tidak mengukur lemak tubuh secara langsung, namun berkorelasi moderat dengan pengukuran lemak tubuh yang lebih langsung.

Lantas, bagaimana indikator seseorang disebut mengalami obesitas? Tanda seseorang mengalami obesitas Dikutip dari laman Verywell Fit, hasil indeks massa tubuh (untuk dewasa) diinterpretasikan sebagai berikut:

- **Di bawah 18,5** mengindikasikan berat badan kurang

- **18,5 hingga 24,9** mengindikasikan berat badan normal

- **25,0 hingga 29,9** mengindikasikan kelebihan berat badan

- **30,0 ke atas** mengindikasikan obesitas.

Indeks massa tubuh Anda dihitung menggunakan data tinggi dan berat badan Anda. Berikut adalah rumus untuk menghitung indeks massa tubuh:

1. METRIK

Metode pertama dan yang cukup umum digunakan adalah metrik. Rumus yang digunakan: berat badan (kilogram) dibagi [tinggi badan (meter)] yang dikuadratkan.

Contoh: berat badan = 68 kilogram dan tinggi badan = 165 sentimeter (1,65 meter), perhitungan indeks massa tubuhnya adalah: $68 / (1,65)^2 = 24,98$.

2. IMPERIAL

Metode kedua adalah penghitungan imperial dengan menggunakan rumus: berat (pon) dibagi tinggi (inci) yang dikuadratkan, kemudian dikali 703.

Contoh: berat = 150 pon dan tinggi = 65 inci maka perhitungan indeks massa tubuh: $[150 / 65^2] \times 703 = 24,96$.

Silakan isi angka-angka pada rumus tersebut sesuai dengan berat dan tinggi badan Anda. Hasilnya bisa disesuaikan dengan indikator indeks massa tubuh di atas.

Tanda Anda mengalami obesitas adalah jika nilai indeks massa tubuh Anda 30,0 atau lebih (Lenteratoday)



WHATSAPP UJI FITUR PERINGKAT PEMBARUAN STATUS

PERUSAHAAN aplikasi pesan instan populer milik Meta, WhatsApp, baru-baru ini menguji fitur peringkat pembaruan status pada Android beta mereka.

Menurut siaran Phone Arena pada Jumat, fitur baru yang sedang diuji di WhatsApp Android Beta disebut ranked status updates atau peringkat status terbaru.

Fitur tersebut dihadirkan untuk memprioritaskan pembaruan status dari kontak terpenting pengguna.

Alih-alih membuat pengguna melihat pembaruan status dari teman-teman di kontak dalam urutan kronologis seperti sekarang, WhatsApp ingin mengatur pembaruan status berdasarkan faktor seperti seberapa sering pengguna berinteraksi dengan masing-masing kontak dan seberapa sering pengguna mengirim pesan ke mereka.

Status yang akan segera kedaluwarsa nantinya juga bakal masuk dalam daftar pemeringkatan sehingga pengguna tidak akan kehilangan momen untuk melihat status dari kontak terkait.

Pembaruan status yang dirilis oleh WhatsApp pastinya tetap akan ditempatkan di urutan teratas agar pengguna tidak melewatkan pengumuman penting dari aplikasi.

Pengguna yang jeli mungkin dapat menemukan tidak adanya stempel waktu pada pembaruan status.

Desain itu sengaja dirancang karena WhatsApp ingin mengalihkan fokus dari pembaruan status terkini ke pembaruan status paling relevan.

WhatsApp menyatakan bahwa semua data yang digunakan untuk

pembaruan peringkat status tetap ada di perangkat pengguna sehingga privasi pengguna tidak terganggu.

Namun, jika pengguna memasang ulang WhatsApp atau menautkan perangkat baru maka sistem peringkat akan diatur ulang sehingga aplikasi akan memerlukan waktu untuk mempelajari kembali preferensi peringkat pengguna dalam melihat status.

Selain itu, apabila satu akun WhatsApp digunakan di beberapa perangkat, maka urutan pembaruan statusnya mungkin sedikit berbeda karena perbedaan riwayat obrolan yang disinkronkan.

Saat ini, fitur peringkat pembaruan status hanya tersedia untuk pengujian beta dalam jumlah terbatas.

Fitur itu mungkin akan diluncurkan untuk khalayak yang lebih luas setelah penerapannya terbukti berhasil dalam pengujian.

WhatsApp Business

Sebelumnya, aplikasi khusus untuk bisnis besutan Meta WhatsApp Business mengumumkan sejumlah pembaruan mulai dari fitur berbasis artificial intelligence (AI/kecerdasan buatan) yang semakin banyak, fitur panggilan hingga memperketat sistem verifikasi akun.

"80 persen orang secara global berkomunikasi dengan bisnis setidaknya seminggu sekali," kata Wakil Direktur Perpesanan Bisnis Meta Nikila Srinivasan, dalam konferensi video bersama jurnalis menjelang konferensi tahunan Conversations, di Jakarta.

WhatsApp Business adalah

aplikasi pesan instan yang ditujukan untuk pelaku bisnis, termasuk usaha kecil menengah (UKM).

Berbeda dengan aplikasi WhatsApp reguler, WhatsApp Business dilengkapi dengan fitur-fitur untuk memperlancar komunikasi dengan pelanggan, misalnya fitur katalog untuk melihat produk yang ditawarkan bisnis tersebut.

Dalam Conversations, yang diadakan di Brazil tahun ini, WhatsApp Business mengumumkan lebih banyak fitur berbasis AI pada platform pesan instan tersebut.

Dengan AI, bisnis bisa berinteraksi dengan pelanggan mereka meskipun tidak beroperasi 24 jam WhatsApp Business menggunakan AI untuk menjawab hal-hal yang sering ditanyakan konsumen sehingga selain bisa terhubung dengan pelanggan kapanpun, konsumen bisa mendapat jawaban secara cepat.

WhatsApp Business juga membuat fitur untuk mengingatkan pelanggan yang bersedia dihubungi, misalnya menawarkan diskon atau mengingatkan ada produk yang tersimpan pada keranjang belanja.

WhatsApp Business juga memperkenalkan fitur panggilan, yang selama ini hanya ada pada aplikasi reguler, untuk perusahaan besar. Saat ini fitur tersebut masih dalam tahap uji coba.

Untuk memperketat

keamanan akun, WhatsApp Business meluncurkan Verifikasi Meta untuk Indonesia, India, Brazil dan Kolombia.

Akun bisnis akan mendapatkan rencana verifikasi sehingga terhindar dari pemalsuan identitas (Antara)



APA PENYAKIT AKIBAT GAYA HIDUP SEDENTARI?

GAYA hidup sedentari seiring waktu bisa mengakibatkan beberapa penyakit kronis. Dikutip dari Health Partners, gaya hidup sedentari adalah kebiasaan kurang bergerak.

Gaya hidup ini terjadi ketika seseorang yang biasa menghabiskan enam jam atau lebih per hari untuk duduk atau berbaring, tetapi bukan termasuk jam tidur.

Meski tampak santai, gaya hidup sedentari memberikan konsekuensi serius bagi kesehatan dalam jangka panjang, misalnya obesitas, kolesterol tinggi, hipertensi, dan masih banyak lagi.

APA PENYAKIT AKIBAT GAYA HIDUP SEDENTARI?

Disari dari Health Partners, Draxe, dan Mens Health, berikut macam penyakit yang bisa berkembang akibat gaya hidup sedentari:

Sakit punggung

Efek membungkuk di depan komputer dapat bertahan hingga melampaui hari kerja Anda. Duduk selama 4 jam berturut-turut dapat meningkatkan tekanan pada cakram di punggung bawah Anda, menurut sebuah penelitian di Penn State.

Kompresi ini dapat mengakibatkan penyakit cakram degeneratif (degenerative disc disease), penyebab umum nyeri punggung.

Penyakit jantung

Duduk terlalu lama berarti otot Anda tidak membakar lemak sebanyak

yang seharusnya dan darah mengalir ke seluruh tubuh lebih lambat.

Hal ini dapat mencakup kardiomiopati, yang memengaruhi cara jantung memompa darah, dan penyakit arteri koroner, di mana aliran darah kaya oksigen ke jantung berkurang.

Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan penyakit ini, tetapi faktor terbesarnya adalah kebiasaan kurang aktif bergerak.

Kolesterol tinggi

Jika Anda kurang aktif bergerak, Anda mungkin memiliki kolesterol tinggi. Ini artinya Anda memiliki terlalu banyak LDL (kolesterol jahat) dan terlalu sedikit HDL (kolesterol baik). Kolesterol tinggi ini berpotensi mengakibatkan pengerasan arteri, masalah pembuluh darah, dan banyak lagi.

Tekanan darah tinggi

Tekanan darah tinggi (hipertensi) terjadi ketika darah mendorong terlalu kuat ke seluruh tubuh, sehingga membuat jantung bekerja terlalu keras. Jika jantung Anda bekerja terlalu keras, hal itu dapat mengakibatkan melemahnya pembuluh darah.

Diabetes

Saat Anda tidak bergerak, tubuh Anda tidak menggunakan banyak gula darah dan ini bisa mengakibatkan hiperglikemia. Hiperglikemia adalah suatu kondisi di mana kadar gula

darah meningkat secara berlebihan.

Sebuah penelitian terhadap lebih dari 80.000 orang menemukan bahwa setiap jam yang mereka habiskan untuk menonton TV meningkatkan risiko terkena diabetes sebesar 3,4 persen.

Kegemukan atau obesitas

Gaya hidup sedentari mengakibatkan tubuh Anda kurang membakar kalori. Orang dewasa dan remaja disarankan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 2,5 jam per minggu untuk mengurangi kemungkinan penyakit jantung.

Sirkulasi darah melambat

Berdiam diri terlalu lama akan memperlambat sirkulasi darah ke kaki, yang dapat mengakibatkan pergelangan kaki bengkak, pembekuan darah, bengkak, dan nyeri.

Efek yang paling buruk dari ini adalah pembentukan trombus vena dalam (deep vein thrombosis/DVT), di mana gumpalan darah terbentuk di pembuluh darah vena bagian dalam. DVT biasa terjadi di kaki, tetapi bisa juga memengaruhi paru-paru.

Kanker

Akibat gaya hidup sedentari juga termasuk meningkatnya risiko kanker tertentu, seperti endometrium, ovarium, dan kanker lainnya. Sebuah tinjauan dalam Journal of National Cancer Institute menganalisis 43 penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan perilaku sedentari

masyarakat dengan kejadian kanker.

Pemikiran kabur

Duduk terlalu lama saat bekerja atau belajar justru bisa membuat Anda sulit berkonsentrasi.

Saat Anda tidak bergerak, darah yang dipompa ke seluruh tubuh, termasuk otak, berkurang. Hal ini memperlambat fungsi kognitif Anda dan mengakibatkan kabut otak (brain fog).

Depresi

Saat aktif secara fisik, otak Anda melepaskan serotonin, yang merupakan bahan kimia peningkat suasana hati. Jadi kurang aktif bergerak, mengakibatkan produksi serotonin Anda lebih sedikit. Ini bisa mengakibatkan perasaan positif dan motivasi hidup Anda lebih rendah. Seiring waktu, kondisi mental yang lemah bisa membuat seseorang mengalami depresi.

Disfungsi ereksi

Perilaku kurang aktif bergerak dapat mengakibatkan bertambahnya berat badan. Pada gilirannya, ini bisa mengakibatkan masalah pada sirkulasi darah di penis juga.

Pria dengan perut lebih besar (pinggang 42 inci atau lebih) dua kali lebih mungkin mengalami disfungsi ereksi dibandingkan mereka yang memiliki ukuran pinggang di bawah 32 inci, menurut sebuah penelitian di Harvard (Kompas)



Izin Tambang Belah ... (dari Hal 1)

PEMERINTAH telah resmi memberikan izin pada organisasi kemasyarakatan agama untuk mengelola lahan pertambangan.

Pemberian izin itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Kamis (30/5/2024) lalu. Melalui peraturan itu, ormas keagamaan diberikan izin untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), sebagaimana tertera dalam Pasal Pasal 83A

Terbaru, dikutip Minggu (9/6/2024) dari Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam legal opinion kepada PP Muhammadiyah dikatakan, "Wewenang Menteri Investasi/Kepala BKPM memberikan WIUPK kepada pelaku usaha termasuk badan usaha yang dimiliki oleh Ormas tidak berdasar menurut hukum."

Trisno menjelaskan, pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi menyatakan, Satuan Tugas, yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koprindasi Penanaman Modal (BKPM), melakukan penawaran dan pemberian WIUPK kepada pelaku usaha, termasuk BUM Desa, BUMD, Badan usaha yang dimiliki oleh ormas, koperasi, badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah.

Pada, tutur Trisno, pasal 1 Nomor 23 UU Administrasi Pemerintahan telah menyatakan pelimpahan kewenangan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah. Pelimpahan itu dilakukan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Dengan begitu, kata Trisno, delegasi wewenang tidak dapat dilakukan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM. Sebab, menurut dia, kedudukan Menteri ESDM dan Menteri Investasi/Kepala BKPM adalah setara/sejajar sesama menteri dan anggota kabinet.

Trisno menuturkan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur kedudukan peraturan presiden dua level di bawah undang-undang. Karena itu, kata dia, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan norma yang terdapat dalam undang-undang.

Sebelumnya Presiden Jokowi akhirnya menandatangani Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aturan itu mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola izin usaha tambang di dalam negeri.

Kebijakan itu yang kemudian menimbulkan kontroversi karena adanya kekhawatiran soal kemampuan ormas untuk mengelola bisnis pertambangan secara efektif. Akibatnya, pengelolaan tambang tersebut dikhawatirkan malah akan menimbulkan konflik sosial dan merusak lingkungan yang kian besar.

Sejumlah pihak bahkan menilai pemberian hak pengelolaan tambang ini hanya upaya pemerintah membagi-bagikan "kue" bisnis kepada ormas keagamaan.

Penolakan juga diungkapkan KWI yang menyatakan tidak akan mengajukan izin usaha tambang. Hal itu ditegaskan oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, Rabu, (5/6/2024).

Menurut Ignatius, mengelola lahan pertambangan bukanlah wilayah KWI, yang selama ini bertugas memberikan pelayanan agama.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) juga menolak izin usaha pertambangan yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada.

Menurut dia, penolakan PMKRI adalah untuk menjaga independensi serta untuk menghindari munculnya sejumlah risiko.

Diantaranya, lanjut Tri, seperti potensi konflik agrarian dengan masyarakat adat atau munculnya ketimpangan sosial.

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) juga mengarah pada keengganan untuk mengajukan izin usaha tambang yang diberikan pemerintah.

Ketua Umum PGI Gomar Gultom mengakui, PGI tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pertambangan, karena hal itu tidak termasuk bidang pelayanan organisasi itu.

"Tapi sudah pasti bahwa masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI dan tidak juga memiliki kemampuan di bidang ini. Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI," kata Gomar dalam keterangan resminya, Kamis (6/6/2024).

Filsuf sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno mendukung sikap KWI yang menolak mengajukan izin untuk usaha tambang. Menurut dia, izin tambang bukan bentuk pelayanan agama.

"Saya dukung sikap KWI bahwa dia tidak akan melaksanakannya. Kami tidak dididik untuk itu dan umat mengharapkan dari kami dalam agama, bukan itu," kata Romi Magnis

kepada wartawan usai menghadiri Dialog Lintas Iman bertema "Merawat Dunia, Menjaga Kehidupan" dalam rangka memperingati Hari Waisak 2024 di Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Menurut dia, meskipun pemberian izin usaha tambang bagi ormas keagamaan bisa saja memiliki maksud yang baik, ormas Katolik dan Protestan akan menolak hal tersebut. "Saya tidak tahu, mungkin maksudnya baik, ya. Tapi, saya kira kalau Katolik dan Protestan sama saja, dua-duanya menolak itu," kata dia.

PBNU: Janji Jokowi Sejak 2021

Di sisi lain PBNU mengaku izin itu sudah dijanjikan sejak 2021. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan Jokowi menawarkan izin tersebut saat berpidato di acara Mukhtamar ke-34 NU di Lampung.

"Pada waktu pembukaan Mukhtamar ke-34 di Lampung bulan Desember 2021 dulu, Presiden Jokowi dalam pidato pembukaannya mengatakan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU," kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Yahya menjelaskan saat itu dirinya belum menjabat sebagai ketua umum lantaran masih pembukaan mukhtamar. Ia menilai pemerintah memberi perhatian besar kepada NU karena jumlah anggotanya.

"Mungkin ya, ini husnudzon kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU, mungkin ya, mungkin ini, karena NU punya umat yang begitu besar," kata dia.

Selain itu, NU mengklaim memiliki sekitar 30 ribu pesantren dan madrasah yang dikelola oleh komunitas nahdliyin -- warga NU. Belum lagi jumlah taman kanak-kanak (TK) dan infrastrukturnya.

Sementara sumber daya dan kapasitas mereka sudah tidak mampu lagi untuk menopang berbagai program tersebut. Kondisi tersebut yang mendorong PBNU segera membutuhkan interferensi atau campur tangan sesegera mungkin.

Sebab jika menunggu afirmasi dari pemerintah secara langsung, PBNU harus melewati birokrasi yang lama dan berbelit-belit. "Kami melihat sebagai peluang, ya segera kami tangkap. Wong (kami) butuh. Mau bagaimana lagi," ucapnya.

Bagi-bagi izin konsesi tambang kepada organisasi keagamaan ini berawal dari janji Presiden Jokowi dalam mukhtamar Nahdlatul Ulama pada Desember 2021. Saat itu, Jokowi berjanji akan membagikan IUP, baik tambang batu bara, nikel, maupun tembaga kepada NU.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah akan memberikan izin pengelolaan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada PBNU. Mengutip website kelompok perusahaan milik Grup Bakrie, KPC merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan mereka.

Bahlil menyebut PBNU sudah mengurus izin pengelolaan tambang kepada Kementerian Investasi/BKPM. Ia mengatakan akan mempercepat penerbitan izin pengelolaan tambang tersebut.

Bahkan, anak buah Presiden Joko Widodo itu mengklaim izin pengelolaan tambang eks KPC untuk PBNU akan terbit minggu depan.

"Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC. Berapa cadangannya nanti begitu kita kasih, tanya mereka," kata Bahlil di kantornya Jumat (7/6/2024).

"Kalau NU sudah jadi, sudah berproses. Saya akan pakai prinsip karena ini kan untuk tabungan akhirat, kita ini kan mau berbuat baik kan, lebih cepat lebih baik. Inshaallah (minggu depan izin PBNU terbit). Setuju gak kita kasih ke organisasi keagamaan?" ungkapnya.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bicara jika ada ormas keagamaan yang menolak pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Jatah lahannya disebut akan dikembalikan ke negara untuk kemudian dilelang kembali.

"Ya kembali kepada negara, kita berlakukan sebagaimana aturan induknya, dilelang kalau tidak mau diambil," kata Arifin.

Lahan tambang yang akan diberikan kepada ormas keagamaan adalah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) generasi I, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Lahan itu dialokasikan kepada enam ormas yang menjadi pilar atau terbesar di masing-masing agama, meliputi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Kristen (Persatuan Gereja Indonesia), Katolik (Kantor Waligereja Indonesia), Hindu, dan Buddha.

Arifin menjelaskan kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada ormas-ormas keagamaan yang selama ini beroperasi secara nonprofit, mendapatkan sumber pendapatan baru.

"Jadi ada sumber untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan itu kan banyak, ibadah, sarana ibadah, pendidikan, kemudian juga masalah kesehatan," beber Arifin.

Sementara jika ada ormas keagamaan yang menolak, kata dia, maka pemerintah membebaskan bagaimana upaya mereka membina dan memberdayakan anggotanya dan masyarakat.

"Jadi ya memperhatikan saja organisasi-organisasi yang membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, selama ini mereka melakukan dengan upaya sendiri, sumbernya dari mana? Ada kelebihan yang ada, sumber daya yang ada diberikan," pungkas Arifin. (tri,rls,sua, tmp,ist/dya)



JUNI BULAN BUNG KARNO

ADI SUTARWIJONO: KITA WARISI API PERJUANGAN, JANGAN ABUNYA



Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya saat refleksi kelahiran Bung Karno, Kamis 6 Juni malam di rumah Jalan Pandean Gang 4 nomor 40, tempat kelahiran Bung Karno. (ist)

SURABAYA-Juni adalah bulan Bung Karno. Bulan ini menjadi istimewa bagi Sang Putra Fajar, sebutan Bung Karno. Ada tiga peristiwa penting bagi Sang Proklamator Kemerdekaan dan Presiden RI pertama itu, yang hingga sekarang ini dikenang dan diperingati masyarakat luas.

Pertama, 1 Juni 1945. Bung Karno menyampaikan pidato tentang Pancasila di depan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Ketika itu di masa penjajahan Jepang. Untuk mengenang dan memperingati peristiwa itu, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, yang diperingati secara nasional.

"Kedua, 1 Juni 1901. Bung Karno lahir di Surabaya ketika fajar merekah. Diberi nama Koesno. Kemudian diubah menjadi Soekarno. Bung Karno lahir di rumah kecil dan sederhana, di kampung Pandean Gang 4 nomor 40. Bung Karno adalah arek Suroboyo. Beliau lahir dan tumbuh di kota yang kultur masyarakatnya egaliter, blak-blakan, penuh persaudaraan. Karakter ini ikut membentuk dirinya, pikiran dan gagasan-gagasannya," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya dikutip Minggu (9/6/2024).

Tepat HUT ke-75 Kemerdekaan RI,

17 Agustus 2020, rumah lahir Bung Karno dibeli Pemerintah Kota Surabaya. Menjelang berakhirnya pemerintahan Walikota Ibu Risma. Di kemudian hari, pemerintahan Walikota Eri Cahyadi membenahi rumah itu, dan dijadikan museum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat luas.

Sebagai destinasi wisata, rumah itu satu rangkaian kunjungan wisatawan dengan rumah indeks Bung Karno sewaktu sekolah menengah di Surabaya, milik Haji Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin Sarikat Islam. Rumah indeks itu terletak di Jalan Peneleh Gang 7 nomor 29-31. Tak jauh dari rumah lahir Bung Karno.

Rumah Pak Tjokro telah lebih dulu dijadikan museum, yang kerap dikunjungi masyarakat luas. Rumah indeks itu ditempati Bung Karno sebelum meneruskan sekolah di Bandung, kini bernama ITB, hingga lulus meraih gelar insinyur.

Peristiwa ketiga, tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno wafat sekaligus mewariskan gagasan-gagasan besar bagi generasi penerus Indonesia, bahkan diwarisi internasional yakni kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. "Itu sebabnya, bulan Juni dikenang sebagai Bulan Bung Karno. Mengutip pesan Bung Karno, kita

Surabaya. Kemudian, 21 Juni 1970, dikenang sebagai wafatnya Presiden RI pertama, Ir. Sukarno.

"Tiga peristiwa penting itu, yang membuat bulan Juni menjadi istimewa bagi Bung Karno. Bapak Bangsa dan Proklamator Kemerdekaan Indonesia telah mewariskan gagasan-gagasan besar dan brilian kepada generasi penerus," ujar Adi Sutarwijono.

Peringatan kelahiran Bung Karno di Pandean kemarin malam juga dihadiri oleh Wakil Walikota Surabaya, Armuji, Ustadz Aris Yoyok dan ratusan kader-



Surabaya menyimpan banyak kisah perjuangan, kepahlawanan dan narasi kebangsaan Indonesia. Ini menjadi modal penting untuk membangun kesadaran nasionalisme. Memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi penerus."

ADI SUTARWIJONO

KETUA DPRD KOTA SURABAYA

warisi apinya! Jangan abunya," kata Adi.

Kota Surabaya merupakan tempat penting dalam pertumbuhan nasionalisme dan perjuangan Indonesia di masa silam. Kota ini disebut Bung Karno sebagai dapur nasionalisme Indonesia. Kota Surabaya menjadi tempat pembentukan gagasan Indonesia di masa pemerintahan kolonial Belanda.

Surabaya tercatat dalam ingatan publik sebagai kota yang memainkan peran penting dalam pembentukan kesadaran sebagai bangsa merdeka, bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Di Kota Surabaya berlangsung berbagai pergerakan dan perlawanan rakyat, sebelum dan pasca kemerdekaan.

"Ada sejumlah peristiwa besar di Surabaya. Salah satunya, pertempuran 10 Nopember 1945 di awal kemerdekaan Indonesia, yang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa heroik itu didahului dengan perobekan bendera Belanda di Hotel Majapahit dan dicituskannya Resolusi Jihad oleh para ulama, yang membakar

perlawanan hebat dari rakyat terhadap tentara sekutu," kata Adi.

Berbagai peristiwa di masa lalu masih bisa dikenali di sejumlah tempat atau menjadi tetenger hingga saat ini. Sehingga menjadi modal penting bagi pewarisan sejarah pada generasi selanjutnya. Menanamkan kesadaran nasionalisme dan pembentukan karakter.

"Surabaya menyimpan banyak kisah perjuangan, kepahlawanan dan narasi kebangsaan Indonesia. Ini menjadi modal penting untuk membangun kesadaran nasionalisme. Memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi penerus. Itu bisa dilakukan melalui cara-cara kreatif, misal, dengan wisata kebangsaan ke tempat-tempat bersejarah," kata Adi Sutarwijono.

Api perjuangan Bung Karno itu, kata Adi, di era sekarang diwujudkan dalam berbagai kebijakan pemerintahan di Surabaya. Yakni, untuk menyejahterakan warga masyarakat, terutama lapisan orang kecil atau wong cilik. "Orang tidak dapat mengabdikan kepada Tuhan, dengan tidak mengabdikan kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin," dikutip dari Bung Karno tahun 1946.

Di pemerintahan Kota Surabaya, telah dilakukan pembebasan biaya pendidikan di SD Negeri dan SMP Negeri. Dan, diberikan bantuan seragam untuk pelajar-pelajar yang tidak mampu. Di bidang kesehatan, juga dilakukan pembebasan biaya pengobatan dan perbaikan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah dan warga masyarakat juga terus berjibaku mengentaskan kemiskinan.

Begitu pula dengan pembenahan kampung-kampung, perbaikan rumah tidak layak huni, dan penciptaan ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah juga terus menata lingkungan yang hijau dan bersih.

"Surabaya terus tumbuh dan dijaga sebagai kota yang maju, nyaman, dan dihuni beragam penduduk. Toleransi dan gotong royong telah menjiwai Surabaya," kata Adi Sutarwijono. (ADV)

Surabaya Refleksikan Hari Kelahiran 'Sang Putra Fajar'

SURABAYA - PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar refleksi kelahiran Bung Karno, Kamis 6 Juni malam. Peringatan berlangsung di rumah Jalan Pandean Gang 4 nomor 40, tempat kelahiran Bung Karno.

Bung Karno lahir 6 Juni 1901 di Kota Surabaya. "Peringatan ini satu menjadi bagian dari Juni Bulan Bung Karno. Sebelumnya kita peringati Hari Lahir Pancasila 1 Juni lalu, dalam upacara yang diikuti kader-kader PDI Perjuangan," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota

kader PDI Perjuangan dan warga masyarakat. Dalam sambutan-nya, Armuji menyampaikan, bahwa di rumah kecil dan sederhana di Jalan Pandean Gang 4 nomor 40, Bung Karno ketika fajar pagi mulai merekah. Itu sebabnya Bung Karno juga dikenal sebagai dengan sebutan Sang Putra Fajar. "Rumah kecil dan sederhana ini, 123 tahun lalu telah melahirkan tokoh besar, yang kelak membebaskan bangsanya. Gagasan-gagasan Bung Karno menggedor dan bergema sampai dunia internasional," kata Armuji. (*)



Pengunjung di Rumah Lahir Bung Karno, Kampung Pandean Gang IV, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya.